

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara sebagai wadah dari suatu bangsa untuk mencapai cita-cita atau tujuan bangsanya sementara hukum merupakan suatu himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu, jadi secara sederhana Negara hukum adalah Negara yang penyelenggara kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam Negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.

Dalam kesehariannya hukum menjangkau berbagai segi kehidupan, baik itu sosial, ekonomi, budaya, dan lainnya. Sebagai negara berkembang, Indonesia terus menerus meningkatkan pembangunan diberbagai bidang, selain itu berbagai kota di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami pembangunan yang signifikan, Pembangunan tersebut tentunya didukung dengan berbagai infrastruktur yang memadai salah satunya adalah pembangunan layanan masyarakat, sarana publik, penambahan lapangan pekerjaan, sarana pendidikan, dan transportasi jalan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Sofyan Lubis, *Persepsi Hukum dan Pembangunan*, diakses dari, [http://www.kantorhukum-lhs.com/details\\_artikel\\_hukum.pembangunan\\_ipitek\\_php?id=13](http://www.kantorhukum-lhs.com/details_artikel_hukum.pembangunan_ipitek_php?id=13). pada tanggal 19 Maret 2017, Pukul 09.02 WIB.

Salah satu kota yang sedang mengalami pembangunan signifikan adalah Kota Bandung yang merupakan Ibukota Provinsi Jawa Barat, dan saat ini menjadi salah satu kota yang memiliki intensitas kunjungan tinggi di Indonesia. Hal ini disebabkan Kota Bandung memiliki banyak perguruan tinggi yang diminati oleh orang-orang dari luar daerah, selain itu Kota Bandung menjadi pusat berbagai hal kreatif yang mendorong orang-orang dari luar kota bahkan daerah untuk menimba ilmu, mencari pekerjaan, menetap atau berwisata.

Sehingga banyak jalan-jalan yang menghubungkan Kota Bandung dengan kabupaten ataupun dengan kota lain menjadi sangat ramai oleh kendaraan-kendaraan roda dua maupun roda empat. Selain itu jalan - jalan protokol yang ada di Kota Bandung setiap harinya dipadati kendaraan roda dua maupun roda empat sebagai akses untuk beraktifitas seperti kantor, sekolah maupun ke pusat perbelanjaan. Dengan melihat sudah banyaknya kendaraan di jalan sehingga kecelakaan akan mudah terjadi.

Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah di Indonesia, mengingat Negara Indonesia adalah Negara kepulauan yang luas dan membutuhkan akses lalu lintas dan Angkutan Jalan yang memadai, agar proses pembangunan dapat terlaksana dengan sebagaimana mestinya.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Klausul Menimbang UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Dengan semakin pesatnya pembangunan dan tersedianya akses-akses jalan yang baik, tentu kebutuhan akan alat transportasi menjadi sesuatu yang sangat penting untuk menunjang pola kehidupan masyarakat di Kota Bandung. Sebab kebutuhan akan alat transportasi sekarang menjadi kebutuhan primer yang harus dimiliki, terutama harga kendaraan bermotor yang cukup terjangkau untuk dimiliki. Dalam pandangan masyarakat Kota Bandung, transportasi umum tidak dapat diandalkan secara maksimal dan efisien, dikarenakan fasilitasnya kurang nyaman, waktu yang ditempuh tidak efektif.

Dalam perkembangan Kota Bandung dari tahun ke tahun semakin banyak perubahan terhadap pola hidup masyarakat, hal ini berpengaruh pada sektor kepemilikan kendaraan di Kota Bandung yang makin meningkat dimana setiap pemilik kendaraan menginginkan kemudahan untuk menjalankan aktifitasnya. Meningkatnya penggunaan kendaraan serta aktivitas masyarakat terutama di Kota Bandung maka meningkat pula kebutuhan masyarakat akan lahan atau ruang parkir. Kendaraan tidak selamanya bergerak, ada saatnya kendaraan itu berhenti, menjadikan tempat parkir sebagai unsur terpenting dalam transportasi.

Masalah sikap berlalu lintas sudah merupakan suatu fenomena yang umum terjadi di kota-kota besar di negara-negara yang sedang berkembang, seperti contohnya Kota Bandung. Persoalan ini sering dikaitkan dengan bertambahnya jumlah penduduk kota yang mengakibatkan semakin meningkatnya aktivitas dan kepadatan di jalan raya. Lalu lintas kendaraan yang beraneka ragam dan penambahan jumlah kendaraan yang lebih cepat dibandingkan dengan

pertambahan prasarana jalan mengakibatkan berbagai masalah lalu lintas, contohnya permasalahan tempat berhenti atau parkir kendaraan bermotor.

Disiplin sangat diperlukan di seluruh aspek kehidupan. Masyarakat sebagai subjek hukum harus patuh dan disiplin terhadap aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dengan kedisiplinan yang baik maka akan tercapai masyarakat yang teratur dan sejahtera. Memang tidak mudah untuk memahami manfaat dari disiplin yang baik, terkadang terasa lebih menguntungkan apabila melakukan hal yang sebaliknya misalnya dalam disiplin berlalu lintas.

Di dalam Pasal 105 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dinyatakan bahwa setiap orang yang menggunakan jalan wajib berperilaku tertib dan/atau mencegah hal-hal yang dapat merintangi , membahayakan keamanan dan keselamatan lalu Lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan.

Permasalahan yang marak terjadi adalah pengguna kendaraan bermotor berhenti atau parkir disembarang tempat, akibat terbatasnya lahan parkir dan ketidaktahuannya terhadap rambu-rambu dalam memberhentikan kendaraan bermotornya, padahal pada ketentuan Pasal 106 ayat (4) huruf e Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan, yang menyatakan bahwa :

*Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang melanggar tata cara berhenti dan Parkir dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,-*

Jelas, bahwa pengguna kendaraan bermotor dalam hal memberhentikan kendaraannya atau parkir harus memperhatikan ketentuan dalam Perundang-undangan yang mengatur hal tersebut, mengingat lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa, terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa, dan terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Diberlakukannya Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan khususnya Pasal 106 ayat (4) huruf e adalah untuk membuat budaya tertib berlalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor, dan terwujudnya budaya selamat dalam berlalu lintas. Namun pada kenyataannya, pengguna kendaraan bermotor masih saja tidak memperhatikan aturan tentang tata cara berhenti dan memarkirkan kendaraannya secara baik dan benar sesuai dengan aturan dan ketentuan Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan data Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Barat, Resor Kota Besar Bandung (Polrestabes) pada periode bulan Agustus sampai - Desember 2014 tercatat sebanyak 474 pelanggaran, pada bulan juli sampai Desember 2015 terjadi sebanyak 739 pelanggaran. Pada periode bulan Mei sampai Desember 2016 tercatat sebanyak 1.289 pelanggaran dan mengalami peningkatan

terhadap pelanggaran rambu berhenti dan parkir.<sup>3</sup> Berdasarkan data tersebut, dapat terlihat masih belum maksimalnya sanksi Pidana Pasal 106 ayat (4) huruf e Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Oleh karena itu, penulis akan melakukan penelitian lebih lanjut, dengan judul skripsi sebagai berikut: **“PENEGAKKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN RAMBU BERHENTI DAN PARKIR BAGI PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 106 AYAT (4) HURUF E UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana penegakkan Pasal 106 ayat (4) huruf e Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?
2. Kendala apa yang dihadapi penegak hukum terkait penegakkan hukum terhadap pelanggaran Pasal 106 ayat (4) huruf e Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?
3. Upaya apa yang dilakukan oleh penegak hukum terkait penegakkan hukum terhadap pelanggaran Pasal 106 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ?

---

<sup>3</sup> Data laporan Operasi Simpatik Lodaya Tahun 2014-2016 Polrestabes Bandung.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Pasal 106 ayat (4) huruf e Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai Tata aturan rambu berhenti dan parkir bagi kendaraan bermotor.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Pasal 106 ayat (4) huruf e Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai Tata aturan rambu berhenti dan parkir bagi kendaraan bermotor.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam pelaksanaan Pasal 106 ayat (4) huruf e Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengenai Tata aturan rambu berhenti dan parkir bagi kendaraan bermotor.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum, khususnya hukum pidana yang terkait penegakan hukum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terutama penerapan Pasal 106 ayat (4) huruf e Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap tata aturan rambu berhenti dan parkir.

## 2. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi masyarakat untuk lebih memahami dan menaati aturan dalam berkendara tentang pentingnya menjaga ketertiban berlalu lintas. Selain itu, untuk aparaturnya penegak hukum hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman untuk melakukan tindakan penegakan hukum di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, kelancaran, dan keselamatan berlalu lintas dan angkutan jalan.

## E. Kerangka Pemikiran

Hukum Pidana adalah hukum bersanksi dengan sifat hukum yang istimewa bukan hanya norma-normanya, melainkan juga hukumannya (sanksi pidananya), sehingga dalam hukum pidana terdapat asas legalitas yaitu *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang artinya tidak ada suatu tindak pidana tidak ada hukuman, kecuali undang-undang mengatur terlebih dahulu daripada perbuatan itu.<sup>4</sup>

Asas legalitas tersebut merupakan dasar untuk tegaknya suatu aturan hukum dimana, Penegakan hukum merupakan rangkaian proses penjabaran ide dan cita hukum yang memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran kedalam bentuk-bentuk konkrit, dalam mewujudkannya membutuhkan suatu organisasi seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan sebagai unsure klasik penegakan hukum yang dibentuk oleh

---

<sup>4</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm, 237.



Negara, dengan kata lain bahwa penegakan hukum pada hakikatnya mengandung supremasi nilai substansial yaitu keadilan.<sup>5</sup>

Menurut Soerjono Soekanto faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:<sup>6</sup>

a. Perangkat Hukum

1) Hukum Materiil

Merupakan pedoman bagi masyarakat tentang apa dan bagaimana mereka berbuat dan tidak berbuat.

2) Hukum Formil

Hukum yang mengatur bagaimana tata cara mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutuskan, dan melaksanakan keputusan.

b. Penegak Hukum

Para penegak hukum harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik dan mampu menjalankan perannya dengan baik pula sehingga tujuan mereka dapat tercapai, penegak hukum merupakan faktor terpenting karena yang paling menentukan penegakan hukum, peraturan perundang-undangan tidak bermakna lagi tanpa ada penegak hukum yang melaksanakannya. Oleh karena itu harus di kaji mengenai kualitas penegak hukum, karena kualitas penegakan hukum ditentukan oleh kualitas penegak hukum itu sendiri.

---

<sup>5</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum : Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 8

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, CV Rajawali, Jakarta, 2005, hlm, 5.

c. Faktor masyarakat

Masyarakat sangatlah berpengaruh dalam penegakan hukum demi terciptanya perdamaian dan ketertiban dimasyarakat, serta penegak hukum sama-sama menaati hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut.

Lawrence Meir Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yaitu :<sup>7</sup>

a. **Struktur Hukum.**

Struktur Hukum adalah tingkatan atau susunan hukum, pelaksana hukum, peradilan, lembaga-lembaga (pranata-pranata) hukum, dan pembuat hukum. Struktur hukum ini didirikan atas tiga elemen yang mandiri, yaitu :

- 1) *Beteknis- system*, yaitu keseluruhan aturan-aturan, kaidah-kaidah, dan asas-asas hukum yang dirumuskan ke dalam sistem pengertian;
- 2) *Instellingen*, atau organisasi-organisasi, yaitu pranata-pranata(lembaga-lembaga) dan pejabat-pejabat pelaksana hukum, yang keseluruhannya merupakan elemen operasional atau pelaksana hukum;
- 3) *Beslissingen en handelingen*, yaitu putusan-putusan dan tindakan-tindakan konkret, baik dari pejabat hukum maupun warga masyarakat. Akan tetapi, hanya terbatas pada putusan-putusan serta tindakan-tindakan yang mempunyai hubungan atau ke dalam hubungan yang dapat dilakukan dengan sistem pengertian tadi.

---

<sup>7</sup> Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hlm. 123.

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Di Indonesia misalnya jika berbicara tentang struktur sistem hukum indonesia, maka termasuk didalamnya struktur instansi-instansi penegakan hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

#### **b. Substansi Hukum**

Substansi, yaitu hakikat dari isi yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan. Substansi mencakup semua aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, seperti hukum materiil (substentif), hukum formil (hukum acara), dan hukum adat yang menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

#### **c. Kultur Hukum**

Kultur hukum merupakan bagian-bagian dari kultur pada umumnya, kebiasaan-kebiasaan, opini warga masyarakat dan pelaksana hukum, cara-cara bertindak dan berpikir atau bersikap, baik yang berdimensi untuk membelokkan kekuatan-kekuatan sosial menuju hukum atau menjauhi hukum. Kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai

dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat.

Kultur hukum merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum, aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Setiap perbuatan yang melanggar atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi suatu delik pidana harus mendapatkan sanksi pidana dan hal tersebut berlaku mutlak. Sanksi pidana sebagai sanksi yang paling tajam dan keras pada dasarnya hanya akan dijatuhkan apabila mekanisme penegakan hukum lainnya yang lebih ringan telah tidak berdaya guna atau sudah sebelumnya dipandang tidak cocok.<sup>8</sup>

Tujuan hukum pidana ialah mengatur masyarakat sedemikian rupa sehingga hak dan kepentingan masyarakat terlindungi, dengan menjatuhkan sanksi pada orang-orang atau badan yang perbuatannya membahayakan kepentingan orang lain atau masyarakat, hukum pidana dapat menjaga ketertiban dan keteraturan dalam masyarakat.<sup>9</sup> Selain itu, tujuan hukum lainnya adalah untuk mendapatkan

---

<sup>8</sup> Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar Atas Pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 15

<sup>9</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hlm, 236.

keadilan, menjamin adanya kepastian hukum di masyarakat serta mendapatkan kemanfaatan atas di bentuknya hukum tersebut. Perkembangan aturan hukum tersebut dalam pelaksanaannya terdapat pergantian aturan-aturan hukum, karena dinilai sudah tidak selaras lagi dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan perkembangan zaman maka hukum harus mengikutinya dengan aturan yang jelas. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketetsediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudann kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik.<sup>10</sup> Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangan belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaanya.<sup>11</sup>

## **F. Langkah-langkah Penelitian**

### **1. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis. Metode deskriptif analitis adalah penelitian yang menggambarkan suatu peraturan Perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Tujuannya memberikan suatu gambaran secara sistematis, faktual

<sup>10</sup> Munir Fuady, *Filsafat dan Teori Hukum Post Modern*, Kencana, Jakarta, 2003, hlm, 40.

<sup>11</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum Di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, hlm, 97.

dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antara fenomena yang diselidiki untuk kemudian dianalisis.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum dengan data yang diperoleh di lapangan.<sup>12</sup> Penulis menganalisis asas-asas hukum, norma-norma hukum dan pendapat para sarjana dengan pendekatan normatif pada Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dan data yang diperoleh khususnya pada pelanggaran tata cara rambu berhenti dan parker di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.

## 3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data Primer, merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung yang berasal dari hasil penelitian dan data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian yaitu Polrestabes Bandung, serta hasil wawancara dengan Anggota Unit Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung.
- b. Data Sekunder, merupakan suatu data yang digunakan untuk membahas permasalahan yang diangkat dan diperoleh melalui berbagai sumber yang telah ada dan bahan-bahan pustaka. Dalam penelitian ini, data sekunder yang dipergunakan mencakup Undang-undang dan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan diantaranya:

<sup>12</sup> Puspita Sari Devi, *Pengertian Penelitian Yuridis Empiris*, Melalui: <<https://www.scribd.com/document/329398499/Pengertian-Penelitian-Yuridis-Empiris>>, diakses pada 02 Oktober 2017 pukul 14.31 WIB.

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti:
    - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
    - b) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
    - c) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan Dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.
  - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber hukum primer seperti hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap sumber data primer dan sekunder, seperti data berupa kamus hukum, artikel-artikel, jurnal yang diperoleh dari ensiklopedia umum secara online.
4. Teknik Pengumpulan Data
- Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain:
- a. Studi kepustakaan, yaitu berupa teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.<sup>13</sup> Dalam hal ini juga merujuk kepada buku-buku yang ada kaitannya dengan peraturan lalu lintas.
  - b. Studi lapangan, teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara:

---

<sup>13</sup>M. Nazir, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hlm. 111.

- 1) Observasi, yaitu memperoleh data dan informasi dengan melakukan penelitian langsung di lapangan di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
- 2) Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab langsung dengan Anggota Unit Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung mengenai penegakan hukum terhadap Pelanggaran rambu berhenti dan parkir bagi pengendara kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung.
- c. Studi dokumen, yaitu berupa teknik pengumpulan data resmi pada instansi pemerintah yang bersifat publik. Dalam penelitian ini data berupa Laporan Hasil Pelaksanaan Penindakan Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung terhadap pelanggaran lalu lintas Operasi Simpatik Lodaya Tahun 2014 (Agustus s/d Desember), 2015 (Juli s/d Desember), 2016 (Mei s/d Desember).

## 5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berupa data deskriptif, seperti kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini data yang dihasilkan adalah kata-kata dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan melalui pengamatan dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap Pelanggaran rambu berhenti dan parkir bagi pengendara

---

<sup>14</sup>Lexy J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, hlm. 4.



kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung. Selanjutnya dianalisis secara kualitatif.

#### 6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilakukan. Pada penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian pada Kepolisian Resor Kota Besar Bandung, Jl. Merdeka No. 18-21, Babakan Ciamis, Kota Bandung, Jawa Barat dan beberapa perpustakaan yang meliputi:

- a. Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Perpustakaan Umum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- c. Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (BAPUSIPDA) Jawa Barat.